

bimbingan dan koreksi yang sangat membangun dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Kepada seluruh staf pengajar dan staf administrasi dan tata usaha Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama masa pendidikan penulis di dalam program pendidikan ini.

Kepada rekan sejawat dan rekan seperjuangan, penulis ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan, kekeluargaan, pengertian, kerjasama dan pertemanan, serta solidaritas saling bahu membahu dalam menyelesaikan program pendidikan ini. Semoga tali silaturahmi yang telah kita bangun, tidak terputus sampai disini.

Kepada seluruh keluarga, Ayah, Ibu dan kedua adik tercinta penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, bantuan dan dukungannya selama hidup penulis, khususnya saat menjalani program pendidikan ini, serta atas doanya yang tulus demi yang terbaik dalam hidup penulis. Terimakasih penulis ucapkan pada Sekar Ayu Paramita khususnya, dan kepada seluruh teman angkatan VI Magister Hukum Kesehatan. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu memberikan berkah dan rahmat serta perlindunganNya di setiap waktu.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, yang tanpa bantuannya penulis tidak dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah Subhanahu

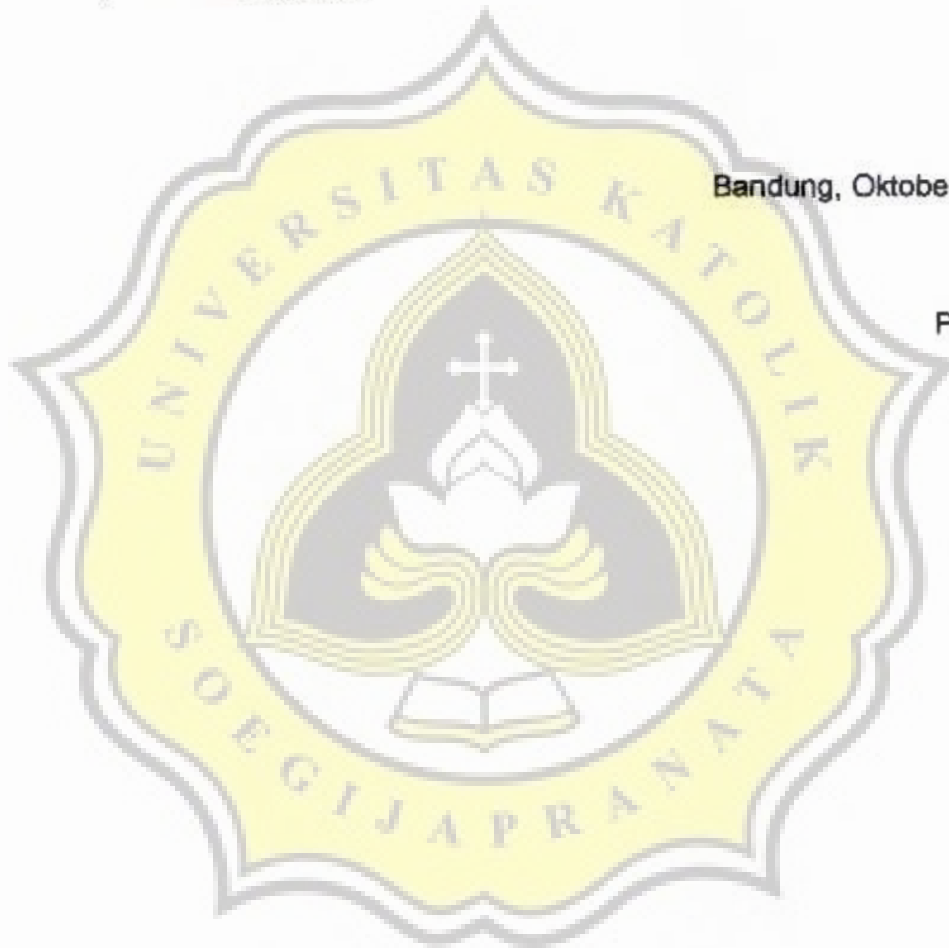
Wata'ala selalu memberikan perlindungan dan membalas budi baik Bapak/Ibu/Saudara sekalian.

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam tesis ini. Kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih.

Amin, Ya Robbal Alamin.

Bandung, Oktober 2010

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar isi.....	vi
Pernyataan Keaslian.....	ix
Abstrak.....	x
Abstract.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Definisi Operasional.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Jenis Data.....	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Metode Analisis Data.....	17
6. Penyajian Tesis.....	17
7. Penutup.....	18

BAB II SISTEM INFORMASI KESEHATAN

A. Sistem Kesehatan Nasional.....	20
B. Pengertian dan Dasar Hukum Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pasien.....	26
C. Rekam Medik dalam Sistem Informasi Kesehatan.....	29
1. Pengertian umum.....	29
2. Tujuan dan Kegunaan Rekam Medik.....	29
3. Peranan Rekam Medik dan Kerahasiaannya pada Penyakit HIV/AIDS.....	36
D. Sistem Informasi Kesehatan pada Penyakit HIV/AIDS.....	37

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM

A. Perlindungan Hukum Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS.....	43
1. Tujuan Hukum.....	43
2. Hak dan Kewajiban di dalam Hukum.....	46

4. Pengertian Perlindungan Hukum	51
B. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dalam Upaya Kesehatan	54
1. Penularan penyakit HIV/AIDS	58
2. Upaya pencegahan penularan penyakit melalui transfusi darah	60
3. Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit HIV/AIDS melalui Sosial	62
4. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Penularan HIV/AIDS	63
C. Peraturan Perundang-Undangan dalam Permasalahan Penyakit Menular HIV/AIDS	67
1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	67
2. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	69
3. Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009	70
4. Kepmenkes RI Nomor. 622/Menkes/SK/VII/1992	69
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	69
6. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	72
7. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	75
D. Hak Asasi Manusia	76
1. Hak untuk Hidup	77
2. Hak untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan	78
3. Hak untuk Mengembangkan Diri	78
4. Hak Keadilan/Hak Memperoleh Keadilan	79
5. Hak Kemerdekaan/Hak Kebebasan Pribadi	79
6. Hak atas Kebebasan Informasi	80
7. Hak Keamanan	80
8. Hak Kesejahteraan	79
9. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan	79
10. Hak Wanita	82
11. Hak Anak	82
E. Hak Asasi Manusia dalam Permasalahan Sosial Penyakit HIV/AIDS	83

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Sistem Informasi Kesehatan Pada Penyakit HIV/AIDS	87
1. Pencegahan Penularan Penyakit HIV/ AIDS	88
a. HIV/AIDS dalam Ruang Lingkup Internasional	88
b. HIV/AIDS dalam Ruang Lingkup Nasional	88
c. Upaya pencegahan penularan HIV/AIDS	90

d. Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penularan dan Penanggulangan HIV/ AIDS di Indonesia	91
B. Hak Asasi Manusia dan HIV/AIDS	98
C. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat dalam Pencegahan Penularan Penyakit HIV/AIDS	99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA.....	108
----------------------------	------------



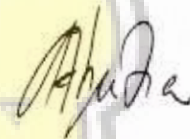
PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini, Achmad Adhipatria P. K, peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Kristen Soegijapranata, NIM 08.93.21, menyatakan bahwa:

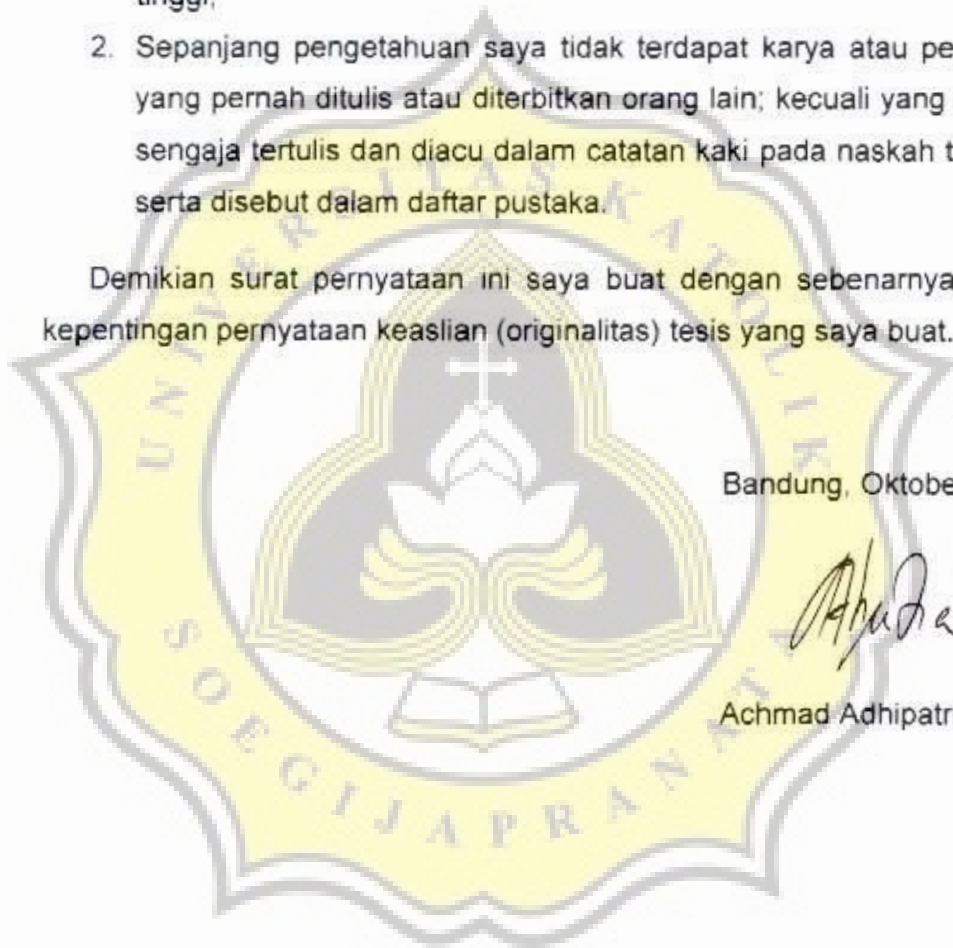
1. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemagisteran di suatu perguruan tinggi,
2. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain; kecuali yang secara sengaja tertulis dan diacu dalam catatan kaki pada naskah tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.

Bandung, Oktober 2010



Achmad Adhipatria P. K



ABSTRAK

Penelitian tesis ini disusun untuk mengetahui bagaimana gambaran Sistem Informasi Kesehatan pada penyakit HIV/AIDS, dan apakah yang disebut dengan perlindungan hukum, serta apakah Sistem Informasi Kesehatan pada penyakit HIV/AIDS dapat menyebabkan tidak dipenuhinya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penularan HIV/AIDS?

Penelitian Tesis ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, lalu kemudian di analisis secara kualitatif.

Sistem Informasi Kesehatan berperan penting dalam menyediakan informasi untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Hal ini tercermin dalam Kepmenkes Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten/kota yang juga berlaku pada penyakit HIV/AIDS. Namun kondisi sosial di masyarakat menuntut perhatian khusus terhadap penyakit ini. Dampak penyakit dan diskriminasi terhadap penderitanya memunculkan isu-isu tentang hak asasi manusia. Seharusnya diskriminasi harus di hapuskan sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 yang melindungi hak asasi manusia. Diskriminasi merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Merahasiakan identitas dan kondisi kesehatan pasien adalah kewajiban dari penyelenggara layanan kesehatan. Dengan merahasiakan rekam medik pasien HIV/AIDS, maka tujuan perlindungan hukum terhadap pasien yang bersangkutan dapat dipenuhi, namun tujuan perlindungan hukum kepada masyarakat, terutama masyarakat di lingkungan sekitar pasien menjadi tidak dapat dipenuhi karena masyarakat menjadi berisiko tinggi tertular penyakit HIV/AIDS. Kebijakan Kepmenkes RI Nomor: 622/Menkes/SK/VII/1992 tentang kewajiban pemeriksaan darah donor juga menyebabkan masyarakat menjadi berisiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS. Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia saat ini tidak dapat memenuhi perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebaiknya dalam penanggulangan HIV/AIDS dibuat kebijakan khusus sehingga dapat melindungi masyarakat dari bahaya penularan penyakit tersebut. Dengan mempertimbangkan data yang ada dan dampak bagi masyarakat, seharusnya HIV/AIDS di masukkan dalam kategori penyakit wabah.

Kata Kunci: SIK, Asas Perlindungan Hukum, HIV/AIDS, HAM

ABSTRACT

This study is being done to determine whether Health Information System could protect the community law protection from HIV/AIDS, to find out the Health Information System in HIV/AIDS patients and the meaning of community evaluation of law protection.

This is a descriptive study with normative juridical approach. The data source come from secondary data, which form by primary, secondary and tertiary law products, then the data were analyzed qualitatively.

Health Information System have an important role providing information to solve health problems. This is written in Kepmenkes No. 932/Menkes/SK/VIII/2002 about developing guide on City Health Information System. This system also works for HIV/AIDS. The social condition demand serious attention for this disease. The impact and discrimination for the bearer of the disease result many issues about human rights. The obligation to maintain human rights is written inside the introduction of Undang-Undang Dasar 1945, and also Undang-undang No. 39/1999. To protect the patients identity and health condition is an obligation of the health provider. By protecting the medical record of HIV/AIDS patients, then the purpose of law protection for that patients is fulfilled, but for the opposite, it wont fulfill the purpose of law protection for community. At this rate, the community become fragile from HIV/AIDS infection. The government policy in Kepmenkes RI No. 622/Menkes/SK/VII/1992 about obligation to run HIV/AIDS test to a blood donor by unlink anonymous system makes the community more fragile from HIV/AIDS infection. The Health Information System in Indonesia these day didnt fulfill the law protection for the community. Government need to make a special policy according to the impact of HIV/AIDS disease so the law protection for the community can be fulfill. Considering the factual data and the impact to the community, HIV/AIDS should be categorize as a plague.

Keywords: Health Information System, Law Protection, HIV/AIDS, Human Rights